

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi dapat dianalisis melalui lima aspek utama, yaitu isi kebijakan, sumber daya, pelaksana, konteks implementasi, serta komunikasi dan koordinasi. Kelima aspek tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, permasalahan implementasi PUSPAGA tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada dinamika teknis dan sosial yang memengaruhi proses pelaksanaannya.

Ditinjau dari aspek isi kebijakan, PUSPAGA telah memiliki tujuan yang jelas sebagai layanan preventif berbasis keluarga untuk mendukung kesetaraan gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara konseptual, program ini dirancang untuk memberikan edukasi pengasuhan, konseling, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan dini. Namun, dalam implementasinya, keberhasilan program belum sepenuhnya terukur secara spesifik di tingkat kecamatan. Strategi operasional yang dijalankan juga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat Semarang Timur yang heterogen dan padat penduduk. Akibatnya, manfaat program belum dirasakan secara luas dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan berbasis gender.

Pada aspek sumber daya, penelitian menunjukkan adanya keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sumber daya yang tersedia. Jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor, maupun pendamping kasus masih belum

sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Selain itu, keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya intensitas sosialisasi program sehingga belum menjangkau masyarakat secara lebih luas. Meskipun sarana dan prasarana pendukung layanan sudah memadai untuk memberikan pelayanan yang responsif dan ramah terhadap korban, kapasitas ruang masih terbatas. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kualitas layanan, kecepatan penanganan kasus, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dari aspek pelaksana, meskipun terdapat komitmen dari DP3A dan pihak terkait dalam menjalankan program, kapasitas dan beban kerja pelaksana masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan jumlah pelaksana menyebabkan sebagian petugas harus bekerja melebihi batas jam kerja untuk menangani laporan dan pendampingan kasus yang terus bertambah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kelelahan kerja (*burnout*), tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban. Selain itu, terbatasnya jumlah pelaksana mengakibatkan jangkauan layanan belum mampu mencakup seluruh wilayah dan kelompok sasaran secara optimal.

Selanjutnya, pada aspek konteks implementasi, faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kecamatan Semarang Timur sangat memengaruhi keberhasilan program. Masih kuatnya budaya patriarki dan ketimpangan relasi gender menyebabkan kekerasan kerap dianggap sebagai persoalan domestik yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Stigma terhadap korban, terutama perempuan, membuat banyak kasus tidak dilaporkan dan sulit dijangkau oleh layanan PUSPAGA. Selain itu, tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk turut menjadi faktor pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan. Kondisi lingkungan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang memerlukan pendekatan persuasif dan berbasis komunitas.

Adapun pada aspek komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan program belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme koordinasi lintas sektor yang intensif dan terintegrasi. Sosialisasi program kepada masyarakat masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan, terutama kelompok rentan. Koordinasi antara

DP3A dengan instansi lain, seperti kelurahan, kecamatan, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum, belum berjalan secara konsisten dan sistematis. Integrasi data antarinstansi juga belum sepenuhnya optimal, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi kasus secara terpadu. Akibatnya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan belum dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis data yang terintegrasi.

Dengan demikian, ketidakberhasilan implementasi Program PUSPAGA dalam menekan kekerasan fisik dan non fisik berbasis gender di Kecamatan Semarang Timur merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor tersebut. Hambatan dalam isi kebijakan, keterbatasan sumber daya, kapasitas pelaksana, kondisi sosial budaya, serta lemahnya komunikasi dan koordinasi saling memengaruhi efektivitas program. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi operasional yang lebih kontekstual, peningkatan kapasitas dan jumlah sumber daya, serta optimalisasi peran pelaksana secara profesional. Selain itu, pendekatan sosial yang responsif gender dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan program PUSPAGA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung peningkatan implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kecamatan Semarang Timur.

##### **1. Peningkatan Intensitas dan Jangkauan Sosialisasi**

DP3A Kota Semarang perlu memperluas dan memperkuat sosialisasi PUSPAGA hingga tingkat kelurahan dan RW, terutama di wilayah dengan angka kekerasan tinggi, karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Strategi komunikasi yang kolaboratif dan pemanfaatan media digital perlu dioptimalkan. Selain itu, edukasi keluarga harus lebih

inklusif dengan melibatkan laki-laki guna mendorong kesetaraan peran dan mengurangi stigma terhadap pelaporan kekerasan.

2. Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Pelaksana

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya. DP3A perlu memperkuat jumlah dan kapasitas tenaga konselor/psikolog serta memastikan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Peran psikolog sangat krusial karena tidak hanya memberikan layanan konseling, tetapi juga mendukung efektivitas sosialisasi dan pelaksanaan layanan preventif lainnya secara profesional dan tepat sasaran.

3. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Lintas Sektor

Pelaksanaan PUSPAGA perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif antara DP3A, UPTD PPA, pemerintah kecamatan, kepolisian, sekolah, lembaga masyarakat, serta berbagai jejaring terkait. Kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi akan mempercepat respons terhadap kasus, memperluas upaya pencegahan, dan mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif di Kecamatan Semarang Timur.